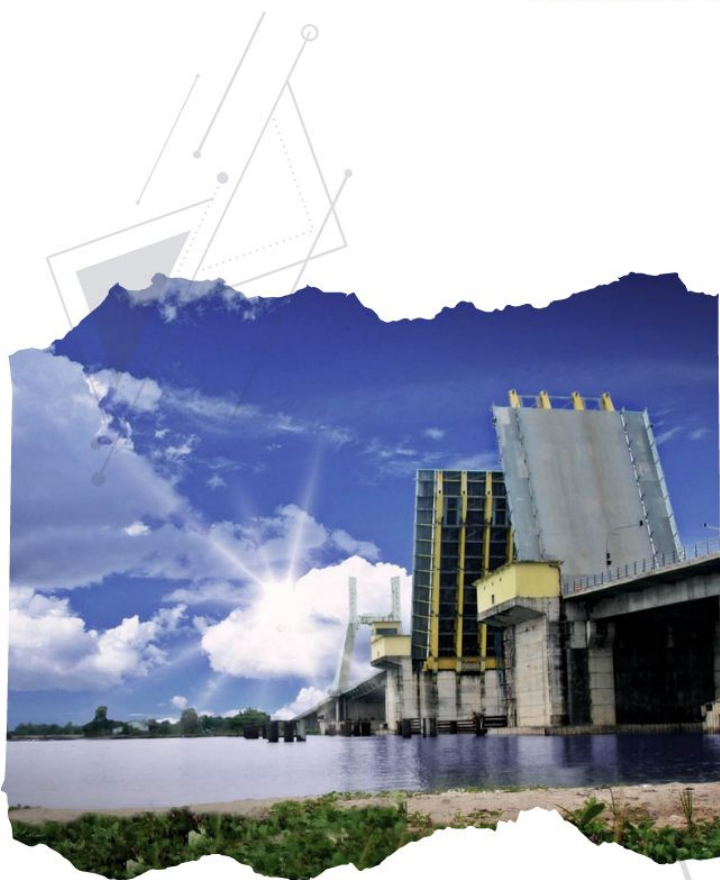




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis ini merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang dan merupakan upaya untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang. Diharapkan melalui Renstra ini arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang dapat dilaksanakan secara sistematis dan menuju kepada pencapaian visi dan misi Kota Pangkalpinang.

Untuk penyempurnaan Renstra ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (stakeholder) sangat diharapkan. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia birokrasi di OPD Dinas Pariwisata dan bermanfaat sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 11 April 2023

Kepala Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang,



Muhammad Yasin, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197311222002121006

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III-3
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	III-7
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah Pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050 Tahun 2020	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas	VII-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berkembang pesat menjadi pusat seluruh kegiatan wilayah termasuk berkembangnya kegiatan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang. Pembangunan Kepariwisata sudah saatnya dilaksanakan secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Pembangunan sektor kepariwisataan memiliki keunikan karena sifatnya yang interdependensi karena pembangunannya harus melibatkan berbagai sektor dan bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara esensial telah merubah format klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan, yakni urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kegiatan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang yang menonjol dan dominan pada sektor perdagangan, industri dan jasa sangat memungkinkan untuk disinergikan dengan pengembangan kepariwisataan. Aksesibilitas menuju Kota Pangkalpinang saat ini tergolong lancar hanya membutuhkan waktu sekitar 60 menit perjalanan dari Jakarta dengan 8 flight penerbangan PP, sedangkan akses lain dengan rute tujuan Palembang dan Tanjung Pandan relatif singkat. Disamping itu Pangkalpinang juga memiliki pelabuhan laut Pangkalbalam yang disamping berfungsi sebagai pelabuhan barang juga berfungsi sebagai pelabuhan penumpang. Kemudian aksesibilitas ke masing-masing destinasi pariwisata relatif mudah dan terjangkau dengan kualitas jalan dan transportasi yang memadai, fasilitas akomodasi pun relatif tersedia dan cukup memadai.

Berdasarkan gambaran potensi-potensi di atas dan melihat salah satu sektor yang akan dikembangkan adalah investasi sektor kepariwisataan, maka terdapat beberapa isu aktual yang dianggap sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yaitu belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan bidang kepariwisataan, kemudian pembangunan bidang kepariwisataan masih kurang melibatkan stakeholders baik pemerintah selaku pengambil kebijakan, pelaku industri pariwisata, pelaku budaya dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, isu selanjutnya adalah kurangnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kepariwisataan, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menangani kepariwisataan. Ancaman kerusakan destinasi pariwisata oleh oknum anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab, serta pembangunan kepariwisataan belum dianggap sebagai sektor andalan.

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah.

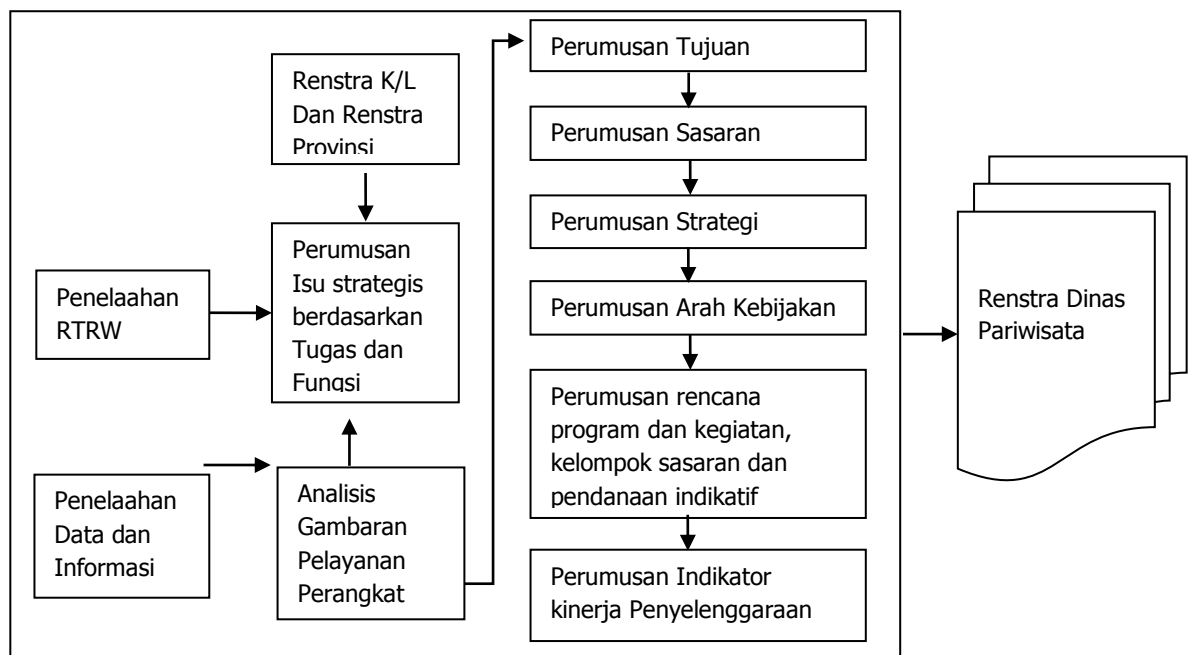
Kemudian pada tahun 2019 telah ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, sehingga terjadilah perubahan pada RPJMN dan skala prioritas nasional terhadap pembangunan, salah satunya terhadap sektor pariwisata sehingga berimplementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan,

pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Disusul dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga adanya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Pariwisata, Revisi Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.

Tahapan penyusunan Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Transisi Dinas Pariwisata

Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pilihan Pariwisata selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Kota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telaahan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota

Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

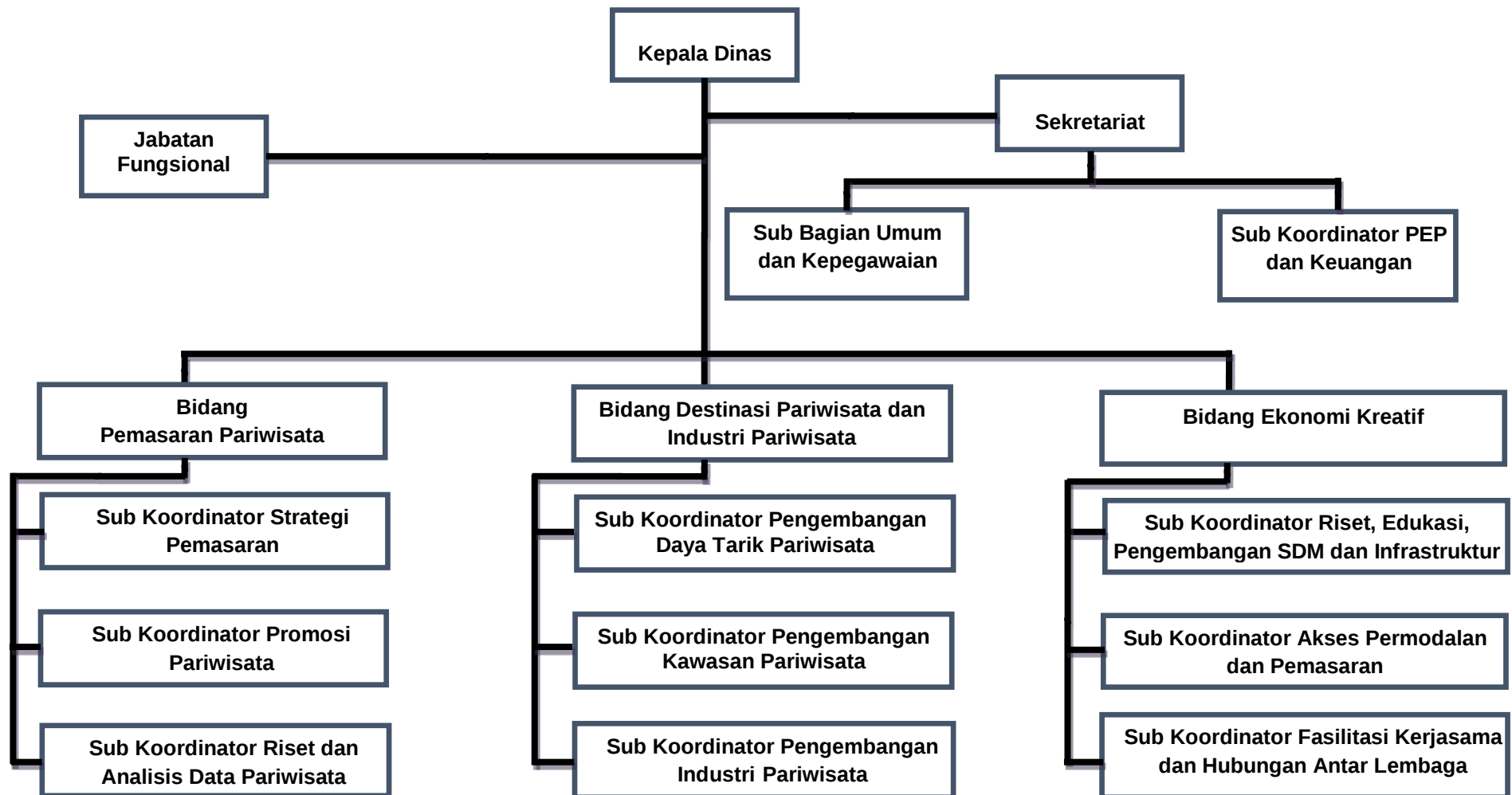
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Koordinator PEP dan Keuangan
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Strategi Pemasaran;
 2. Sub Koordinator Promosi Pariwisata; dan
 3. Sub Koordinator Riset dan Analisis Data Pariwisata;
- d. Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 3. Sub Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 2. Sub Koordinator Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
 3. Sub Koordinator Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

2.1.1. Uraian Tugas

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pariwisata;
- d. penetapan rencana kerja dinas Pariwisata menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Pariwisata;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan Pariwisata di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata;
- 2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pariwisata;
- 3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pariwisata;
- 4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pariwisata; dan ;
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pariwisata dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan industri pariwisata Pemerintah Kota;
- 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota;

- 3) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Kota;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Kota;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata; dan;
- 6) melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota; dan;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tata kelola peningkatan kebijakan teknis bidang Ekonomi Kreatif di lingkungan pemerintah daerah;
- 2) pelaksanaan pengembangan bidang Ekonomi Kreatif;
- 3) pelaksanaan standar kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif skala kota;
- 4) pelaksanaan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah di Kota;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pengembangan Ekonomi Kreatif lingkup Pemerintah Kota;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan pengembangan Ekonomi Kreatif Kota; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terhitung tanggal 01 Januari 2023 sebanyak 75 orang, terdiri dari 29 PNS (6 laki-laki dan 23 perempuan) dan 46 non PNS (24 laki-laki dan 22 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, jumlah PNS yang berpendidikan S2 sejumlah 4 orang, S1 sejumlah 22 orang dan D3 sejumlah 3 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pariwisata Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Tidak Tamat	-	-	7	8	15
2	SD Sederajat	-	-	-	1	1
3	SMP Sederajat	-	-	3	-	3
3	SMA Sederajat	-	-	11	6	17
4	D3	-	3	-	2	5
5	S1	5	17	4	4	30
6	S2	1	3	-	-	4
7	S3	-	-	-	-	-
TOTAL		6	23	25	21	75

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Dilihat dari golongannya, pada tahun 2023 pegawai PNS Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terdiri dari golongan IV sejumlah 4 orang, golongan III sejumlah 23 orang dan golongan II sejumlah 2 orang, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pariwisata Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	2	2
2	Golongan III	5	18	23
3	Golongan IV	1	3	4
TOTAL		6	23	29

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata meliputi Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2022 (Semester II)

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Unit	Jumlah	Kondisi
1	Tanah		2.376.660.000,00	Baik
2	Peralatan dan mesin		1.923.594.994,38	Baik
	Pompa Air	4		Baik
	Mini Bus Suzuki Ertiga	1		Baik
	Sepeda Motor	4		Baik
	Perkakas bengkel khusus lainnya	2		Baik
	Termometer Standar	1		Baik
	Alat pemeliharaan tanaman	1		Baik
	Alat Prosesing lainnya (Wasser)	5		Baik
	Mesin Ketik Manual Portabel	4		Baik
	Lemari Besi/Metal	61		Baik
	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1		Baik
	Papan Visual/Papan Nama	1		Baik
	White Board	4		Baik
	Peta	1		Baik
	Alat Penghancur Kertas	1		Baik
	Panel Pameran	13		Baik
	Stempel Timbul/Bulat	1		Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1		Baik
	Papan Pengumuman	1		Baik
	Teralis	1		Baik
	Alat Kantor Lainnya	33		Baik
	Meja	55		Baik
	Kursi	77		Baik

	Sofa	31		Baik
	Meubeleur lainnya	5		Baik
	Mesin Pemotong Rumput	1		Baik
	Alat Pembersih lainnya	27		Baik
	A.C.	17		Baik
	Kipas Angin	11		Baik
	Exhause Fan	3		Baik
	Kompor Gas (Alat Dapur)	2		Baik
	Tabung Gas	1		Baik
	Alat Dapur lainnya	6		Baik
	Televisi	5		Baik
	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1		Baik
	Megaphone	3		Baik
	Microphone	2		Baik
	Tangga Aluminium	1		Baik
	Karpet	1		Baik
	Gordyin/Kray	2		Baik
	Tangki Air	2		Baik
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4		Baik
	Meja Kerja Pejabat	11		Baik
	Kursi Kerja	56		Baik
	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1		Baik
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9		Baik
	Camera Film	2		Baik
	Alat Studio Lainnya	8		Baik
	Handy Talky (HT)	5		Baik
	Wireless Amplifier	1		Baik
	Alat Kesehatan Umum lainnya	9		Baik
	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1		Baik
	P.C Unit	25		Baik
	Lap Top	9		Baik
	Note Book	1		Baik
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16		Baik
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2		Baik

	Peralatan Komputer lainnya	2		Baik
3	Gedung dan bangunan		12.222.927.680,98	Baik
	Bangunan Gedung	65		Baik
	Makam Bersejarah	1		Baik
4	Jalan, Irigasi dan jaringan		2.969.727.659,27	Baik
	Jalan	1		Baik
	Bangunan air irigasi lainnya	1		Baik
	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2		Baik
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	4		Baik
	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Lain-lain	1		Baik
	Instalasi pembangkit listrik lainnya	10		Baik
	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1		Baik
	Jaringan listrik lainnya	9		Baik
5	Asset tetap lainnya		54.900.000,00	Baik
	Alat Musik Tradisional/Daerah	9		Baik
	Pahatan Kayu	1		Baik
	Barang Kerajinan Lain-lain	1		Baik
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	79.756.000,00	Baik
	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	1		
	TOTAL		19.627.566.334,63	

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang meliputi Pemerintahan **URUSAN PARIWISATA**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kepariwisataan melalui pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif.

Tujuan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk Urusan Pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan target indikator tujuan PDRB perkapita.

Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk Urusan Pariwisata adalah meningkatnya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah dengan target indikator sasaran PAD sektor pariwisata.

Pada tahun 2018-2023 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan beberapa pelayanan yang berkaitan dengan urusan kepariwisataan antara lain:

1. Tingkat hunian akomodasi ke Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7 persen pertahun;
2. Berkembangnya jumlah usaha jasa pariwisata yang berkualitas di Kota Pangkalpinang sebagai penunjang ekonomi kreatif;
3. Bertambahnya jumlah destinasi wisata di Kota Pangkalpinang.

Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jenis media promosi pemasaran pariwisata			1 jenis					1 jenis					100%				
2	Jumlah jenis pelayanan informasi wisata			6 jenis					6 jenis					100%				
3	Jumlah pameran yang diikuti/diselereng arakan dalam 1 tahun			1 kali					1 kali					100%				
4	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemandu wisata			174 orang					174 orang					100%				
5	Jumlah objek wisata unggulan yang dipelihara			7 objek					7 objek					100%				
6	Tersedianya gapura identitas			1 paket					1 paket					100%				
7	Tersedianya kios cinderamata			10 unit					10 unit					100%				
8	Tersedianya plaza pusat jajanan kuliner			450m2					450m2					100%				
9	Tersedianya jalur pajalan kaki			1 paket					1 paket					100%				
10	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sadar wisata			50 orang					50 orang					100%				

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

11	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			160 orang					160 orang					100%				
12	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan				3%					3%					100%			
13	Jumlah jenis pelayanan informasi wisata				6 jenis					6 jenis					100%			
14	Jumlah jenis media promosi pemasaran pariwisata				1 media					1 media					100%			
15	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata				1 dokumen					1 dokumen					100%			
16	Jumlah objek wisata unggulan yang dipelihara				1 objek					1 objek					100%			
17	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemandu wisata				80 orang					80 orang					100%			
18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD					10%	10%				10,33%	16.28%				103,30 %	162.8 %	
19	proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)					5.2%	5.35%				4.15%	4.15%				79.8%	77.57 %	
20	Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1 kawasan	1 kawasan				1 kawasan	1 kawasan				100%	100%	
21	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata					1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				100%	100%	
22	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata					1 destinasi	1 destinasi				1 destinasi	1 destinasi				100%	100%	

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

23	Jumlah entitas pengelolaan destinasi					1 destinasi	1 destinasi				1 destinasi	1 destinasi				100%	100%	
24	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba					200 orang	10 orang				0 orang	160 orang				0%	1600 %	
25	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan					10%	10%				31.54%	40.32%				315,40 %	403.2 %	
26	Tingkat hunian akomodasi					50%	50%				21.59%	34.06%				43.18 %	68%	
27	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara					312 orang	343 orang				163 orang	859 orang				52.24 %	250.43 %	
28	(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara					146.700 orang	161.370 orang				195.067 orang	273.093 orang				133%	169.23 %	
29	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					3 kali	3 kali				3 kali	5 kali				100%	100%	
30	Jumlah jenis media promosi					4 jenis	4 jenis				4 jenis	4 jenis				100%	100%	
31	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri					2 event	2 event				1 event	1 event				50%	50%	
32	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata					1 dokumen					1 dokumen					100%		
33	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif					35%	35%					36.36%					103.88 %	
34	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif					0	3 kali					2 kali					66,68 %	

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

35	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat					0	10 lokasi					47 lokasi					470,00 %	
36	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf					30%	35%				32%	38.77%					106.67 %	110.77 %
37	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja					10,72 %	11,59%				3,58%	9.23%					33.4%	79.63 %
38	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar					3 kali	2 kali				3 kali	1 kali					100%	50%
39	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan					40 orang					40 orang						100%	
40	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat					7 lokasi	1 lokasi				7 lokasi	47 lokasi					100%	4700 %
41	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan					60 orang	20 orang				0							
42	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata					1 dokumen	0				1 dokumen						100%	

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

43	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif					0	1				0							
44	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan					40 orang	40 orang				0							
45	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD							10%										
46	proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)							5.5%										
47	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							1 kegiatan										
48	Jumah entitas pengelolaan destinasi							25										
49	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata							1 destinasi										
50	Jumlah entitas pengelolaan destinasi							1 destinasi										
51	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba							10 orang										
52	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota							13										
53	Jumlah industri usaha pariwisata yang mendapat pembinaan dan pengawasan							13										

54	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan							10%										
55	Tingkat hunian akomodasi							50%										
56	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara							377 orang										
57	(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara							177.507 orang										
58	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							5 kali										
59	Jumlah jenis media promosi							4 jenis										
60	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri							3 event										
61	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata							1 dokumen										
62	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri							25										
63	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata							2										
64	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif							30%										
65	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem							3										

	ekonomi kreatif																	
66	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat							10 lokasi										
67	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan							100 orang										
68	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							12										
69	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf							35%										
70	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja							12,47%										
71	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar							2 kali										
72	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat							1 lokasi										



73	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan							20 orang										
74	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif							1										
75	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan							40 orang										



Adapun Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			10%	10%	10%	10%	-82,07%	-45,63%	427%	0	-8,21%	-4,56%	42,7%	0
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota			10%	10%	10%	10%	-57,57%	31,63%	40%	0	-5,76%	3,16%	4,0%	0
3	Tingkat hunian akomodasi			5%	5%	5%	5%	29,95%	21,59%	34,06%	0	5,99%	4,32%	6,81%	0
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			5%	5,20%	5,35%	5,50%	4,10%	4,15%	4,15%	0	82%	78,84%	78,84%	0
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			2,10 %	10%	10%	10%	9,86%	10,33%	16,28%	0	469,50%	103,30%	162,8%	0

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
Program pelayanan administrasi perkantoran	801.806.800,00	491.453.450,00	-		730.626.590	476.975.452	-		91,12	97,05	-		646.630.125,00	603.801.021,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	321.135.500,00	96.620.800,00	-		298.666.957	75.902.300	-		93	78,56	-		208.878.150,00	187.284.628,50
Program peningkatan disiplin aparatur	40.040.000,00	-	-		37.100.000	-	-		92,66	-	-		40.040.000,00	37.100.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	30.000.000,00	-	-		16.000.000	-	-		53,33	-	-		30.000.000,00	16.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.099.720,00	12.180.000,00	-		27.944.560	12.180.000	-		96,03	100	-		20.639.860,00	20.062.280,00
Program pengembangan pemasaran pariwisata	979.498.500,00	-	-		963.979.612	-	-		98,42	-	-		979.498.500,00	963.979.612,00
Program pengembangan destinasi pariwisata	3.194.204.660,00	-	-		3.057.070.534	-	-		95,7	-	-		3.194.204.660,00	3.057.070.534,00
Program pengembangan kemitraan	383.600.000,00	-	-		372.289.500	-	-		91,12	97,05	-		383.600.000,00	372.289.500,00
Program peningkatan kepariwisataan	-	4.034.884.984,00	-		-	2.337.824.988,9	-		93	78,56	-		4.034.884.984,00	2.337.824.988,90

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	-	-	3.416.706.065,00	3.936.592.262,00	-	-	3.316.279.968,00	3.811.256.954,00	53,33	-	97,06	96,82	3.676.649.163,50	3.563.768.461,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	1.212.145.806,00	9.149.914.800,00	-	-	1.162.043.240,00	8.385.533.875,00	96,03	100	95,87	91,65	5.181.030.303,00	4.773.788.557,50
Program Pemasaran Pariwisata	-	-	706.452.763,00	689.439.100,00	-	-	693.543.776,00	672.605.500,00	-	-	98,17	97,56	697.945.931,50	683.074.638,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	1.522.892.000,00				1.517.842.000,00			-	99,67	1.522.892.000,00	1.517.842.000,00
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	274.905.066,00	297.266.000,00	-	-	268.255.066,00	287.945.000,00	-	-	97,58	96,86	286.085.533,00	278.100.033,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yaitu terbatas dalam hal pendanaan sehingga harus mengoptimalkan dengan APBD yang tersedia dan dana pusat seperti DAK non Fisik serta DAK Fisik.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang

RETRIBUSI	2019		2020		2021		2022		Persentase Realisasi			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2019	2020	2021	2022
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	19.200.000	0	0	7.800.000	0	0	0	100
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000	196.825.000	55.000.000	29.000.000	5.000.000	3.200.000	16.200.000	32.000.000	93,80	52,73	64	197,53

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Kekuatan

Kekuatan adalah situasi yang mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan membantu mencapai tujuan dari dalam (internal). Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Banyaknya pelaksanaan event pariwisata;
- 2) Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
- 3) Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
- 4) Keragaman budaya daerah Kota Pangkalpinang; dan
- 5) Kreatifitas sumber daya manusia yang tinggi, serta banyaknya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan.

2.4.2 Kelemahan

Kelemahan adalah situasi yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan dan berasal dari dalam (internal). Kelemahan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya penguasaan teknologi;
- 2) Kurangnya inovasi dari sumber daya manusia pariwisata yang ada; dan
- 3) Lemahnya disiplin aparatur;

2.4.3 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;
2. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;

3. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
4. Banyaknya event pariwisata baik dalam maupun luar daerah guna meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
5. Banyaknya konsumen produk Ekonomi Kreatif.

2.4.4 Tantangan/ Ancaman

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjalanan yang dilakukan ke Kota Pangkalpinang cenderung untuk perjalanan bisnis/ pekerjaan;
- 2) Tingkat hunian akomodasi belum maksimal dikarenakan kegiatan di hotel hanya sebatas rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi/ pemerintah;
- 3) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam penanganan pandemi covid-19;
- 4) Masih tingginya inflasi di Kota Pangkalpinang;
- 5) Tuntutan inovasi produk Ekonomi Kreatif; dan
- 6) Pemanfaatan teknologi dalam sektor Ekonomi Kreatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan kepariwisataan merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan daerah. Dengan dijadikannya Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan jumlah wisatawan yang datang ke Pangkalpinang semakin meningkat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan PDRB di sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan tantangan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan datang ke Pangkalpinang.

Sehingga dalam menjalankan tujuan tersebut Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Urusan Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
- b. Belum adanya riset pasar wisatawan
- c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
- d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial
- e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
- f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
- g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif
- h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
- i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun
- j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Pembentukan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas penguatan terhadap salah satu unggulan daerah yaitu pariwisata di Pemerintahan Kota Pangkalpinang pada khususnya, dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

Potensi pengembangan kepariwisataan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- a. Banyaknya pelaksanaan event pariwisata;
- b. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
- c. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
- d. Keragaman budaya daerah Kota Pangkalpinang;
- e. Kekayaan alam dan potensi pariwisata;
- f. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;
- g. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
- h. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Kota Pangkalpinang

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang salah satu tujuan Kota Pangkalpinang adalah Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Dasar melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang Berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan sasaran Kota Pangkalpinang Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan indikator Realisasi Investasi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dispar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kementerian Pariwisata Misi : Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	S1. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi S2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif nasional S3. Meningkatkan kualitas dan jumlah wisatawan S4. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional S5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan S6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional S7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif S8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian S9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif S10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	• Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan ke provinsi kepulauan bangka Belitung • Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat • Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai	• Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN • Kurangnya pemanfaatan teknologi digital • Data kepariwisataan tidak lengkap • Masih kurangnya aksesibilitas, amenitas, acilliary dan atraksi pariwisata di daerah • Kurangnya diversifikasi produk wisata di daerah • Pemasaran belum fokus pada upaya meningkatkan dampak pada peningkatan • Masih banyak SDM pariwisata yang belum memiliki sertifikasi	Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB dijadikan indikator capaian kinerja Pembangunan Daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Meningkatnya kunjungan wisatawan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga			
	Sasaran Meningkatkan kunjungan wisatawan	Terbatasnya pengembangan destinasi dan pemasaran serta peningkatan kemitraan kepariwisataan	- terbatasnya anggaran - kurang optimalnya SDM pariwisata - kurangnya pengembangan daya tarik wisata	Komitmen pemerintah dengan stakeholder dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan wisata sejarah, wisata budaya, wisata pesisir, wisata olahraga	• Menurunnya kualitas obyek wisata • Menurunnya jumlah objek wisata	Banyaknya aktifitas perekonomian seperti penambangan timah inkonvensional, yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat yang tidak mengacu RTRW Kota menyebabkan banyak objek wisata pada destinasi pariwisata maupun cagar budaya yang ada di Pangkalpinang rusak.	Mendorong masyarakat untuk mencintai lingkungan. Perlu penegakan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan RTRW Kota Pangkalpinang

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, telaahan terhadap Tujuan dan Sasaran Kota Pangkalpinang, kemudian telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta telaahan rencana tata ruang wilayah serta hasil kesepakatan antar pegawai Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, yaitu :

1. Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai;
4. Terbatasnya pengembangan destinasi dan pemasaran serta peningkatan kemitraan kepariwisataan;
5. Menurunnya kualitas objek wisata; dan
6. Menurunnya jumlah objek wisata.

Maka dapat ditarik isu-isu strategis untuk pembangunan jangka menengah 3 (Tiga) tahun ke depan yaitu :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan potensi pariwisata dengan indikator Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pariwisata dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata dengan indicator sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan;
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan;
3. Tingkat hunian akomodasi; dan
4. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Tahun			Akhir Renstra 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatkan potensi pariwisata		Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan	%	16,48	10	10	10	10
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	273.952	214.753	236.228	259.851	259.851
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,12	1	1	1	1
		Tingkat hunian akomodasi	%	34,06	25	26	27	27
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin	%	72,57	73,57	74,57	75,57	75,57

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan promosi, kemitraan dan kelembagaan pariwisata.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan pelayanan prima pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang;
2. Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata dalam rangka mendukung pengembangan daya tarik wisata;
3. Peningkatan promosi pariwisata secara masif melalui media cetak dan elektronik;
4. Pembinaan dan peran serta pelaku ekonomi kreatif; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

Arah kebijakan di atas menjadi prioritas oleh Dinas Pariwisata dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam Tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan potensi pariwisata	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan promosi, kemitraan dan kelembagaan pariwisata	1. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan pelayanan prima pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang; 2. Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata dalam rangka mendukung pengembangan daya tarik wisata; 3. Peningkatan promosi pariwisata secara masif melalui media cetak dan elektronik; 4. Pembinaan dan peran serta pelaku ekonomi kreatif; dan 5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan pendukung adalah kegiatan yang bersifat operasional dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi perangkat daerah. Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan fungsi urusan pilihan pariwisata. Berikut penjabaran program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

		SKPD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

		Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
		Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Riset
		Pemberian Insentif
		Pengembangan Sistem Pemasaran
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
	Kegiatan Pengembangan	Pelatihan, Bimbingan Teknis,dan

	Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

Secara rinci rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum pada tabel berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang

2023-03-27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan potensi pariwisata															
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata														
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73,18	73.30	4.087.809.343	73,42	4.372.394.017	73.50	4.433.193.315	73.50	12.893.396.675	SEKRETARIAT	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	100	100		100		100		100		SEKRETARIAT	
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	21.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
		3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	8	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	12	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	12	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	3.404.388.991	100	3.489.388.289	100	3.576.587.587	100	10.470.364.867	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	32	34	3.401.388.991	34	3.486.388.289	34	3.573.587.587	134	10.461.364.867	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	17	17	1.000.000	17	1.000.000	17	1.000.000	68	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	
		3.26.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	0.020	0.56	1.000.000	0.56	1.000.000	0.56	1.000.000	0.56	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
		3.26.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	0	30.500.000	0	57.400.000	0	57.400.000	0	145.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	
	3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	24.500.000	1	36.400.000	1	36.400.000	4	97.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	5	5.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	15	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	117.000.000	100	242.000.000	100	192.000.000	100	551.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN		
	3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	8	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	37.000.000	0	0	0	0	100	37.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	40	30	27.000.000	0	0	0	0	70	27.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	369.716.960	100	372.716.960	100	372.716.960	100	1.115.150.880	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	4	270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	4	87.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	250.716.960	1	253.716.960	1	253.716.960	4	758.150.880	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	119.203.392	100	200.888.768	100	224.488.768	100	544.580.928	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	
		3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	61.931.696	1	61.931.696	1	61.931.696	4	185.795.088	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	22.271.696	1	103.957.072	1	127.557.072	4	253.785.840	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya (Dengan Satuan:%)	6	6	692.107.488	6	712.107.488	6	732.107.488	6	2.136.322.464	BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	45.000.000	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA	
		3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lokasi)	61	61	15.000.000	61	15.000.000	61	15.000.000	61	45.000.000	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	25	50	25.000.000	75	25.000.000	100	25.000.000	100	75.000.000	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
	3.26.02.2.02.02		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	60.000.000	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
	3.26.02.2.02.05		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	5.000.000	4	15.000.000	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	100	637.107.488	100	657.107.488	100	677.107.488	100	1.971.322.464	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	14	16	622.107.488	17	642.107.488	17	662.107.488	17	1.926.322.464	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
	3.26.02.2.03.06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	4	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	10	45.000.000	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	73.07	75	15.000.000	77	15.000.000	79	15.000.000	79	45.000.000	SUB KOORINATOR PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	
	3.26.02.2.04.04		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	45.000.000	SUB KOORINATOR PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan (Dengan Satuan:%)	35	37	350.872.160	38	472.086.784	39	527.086.784	39	1.350.045.728	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Event)	2	5	350.872.160	5	472.086.784	5	527.086.784	17	1.350.045.728	SUB KOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	
				Persentase data pariwisata yang dikelola (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SUBKOORDINATOR RISET ANALISIS DATA PARIWISATA	
				Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata (Dengan Satuan:%)	0	5		5		5		5		SUB KOORDINATOR STRATEGI PEMASARAN DAN BRAND PARIWISATA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	177.872.160	1	197.086.784	1	202.086.784	4	577.045.728	SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	150.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	4	700.000.000	SUBKOORDINATOR STRATEGI PEMASARAN DAN BRAND PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000	SUBKOORDINATOR RISET ANALISIS DATA PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000	SUBKOORDINATOR STRATEGI PEMASARAN DAN BRAND PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	13.000.000	SUBKOORDINATOR RISET ANALISIS DATA PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
Meningkatkan potensi pariwisata															
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata														
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	17	28.08	55.000.000	34.61	75.000.000	41.14	60.000.000	41.14	190.000.000	BIDANG EKONOMI KREATIF		
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insentif (Dengan Satuan:%)	33.33	67	55.000.000	83	75.000.000	100	60.000.000	100	190.000.000	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN		
	3.26.04.2.02.01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.04.2.02.06	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan (Dengan Satuan:Laporan)	8	4	40.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	20	125.000.000	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	Kota Pangkal Pinang	
	3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (Dengan Satuan:%)	13,06	22	195.000.000	32	280.000.000	42	290.000.000	42	765.000.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Dengan Satuan:%)	23.53	24	155.000.000	25	240.000.000	26	245.000.000	26	640.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Dengan Satuan:Orang)	40	10	75.000.000	10	80.000.000	10	85.000.000	70	240.000.000	SUBKOORDINATOR RISET EDUKASI PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR	Kota Pangkal Pinang
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Dengan Satuan:Orang)	35	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	140	30.000.000	SUBKOORDINATOR STRATEGI PEMASARAN DAN BRAND PARIWISATA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	40.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	4	280.000.000	SUBKOORDINATOR RISET EDUKASI PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR	Kota Pangkal Pinang
		3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)	20	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	110	90.000.000	SUBKOORDINATOR RISET EDUKASI PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR	Kota Pangkal Pinang
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh Sertifikasi (Dengan Satuan:%)	3.65	4	40.000.000	4.5	40.000.000	5	45.000.000	5	125.000.000	SUBKOORDINATOR FASILITAS KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
		3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)	15	30	25.000.000	30	25.000.000	30	30.000.000	105	80.000.000	SUBKOORDINATOR FASILITAS KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000	SUBKOORDINATOR FASILITAS KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Kota Pangkal Pinang
		3.26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)	0	5	5.000.000	7	5.000.000	10	5.000.000	22	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	Kota Pangkal Pinang
TOTAL:						5.380.788.991		5.911.588.289		6.042.387.587		17.334.764.867			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG															
MUHAMMAD YASIN, S.E., M.M															
NIP.197311222002121006															

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Kota Pangkalpinang ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tahun 2024-2026

NO	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
						2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Dasar melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	9,27	4	4,25	4,5	4,5
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		Realisasi Investasi	Milyar	438,1	500	525	550	550
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah		Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB	%	18,02	19,27	20,52	21,77	21,77
3	Meningkatkan potensi pariwisata		Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan	%.	10,33	10	10	10	10
4	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	195.230	214.753	236.228	259.851	259.851
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	0,7	1	1	1	1
			Tingkat hunian akomodasi	%	21,59	25	26	27	27
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin	%	72,57	73,57	74,57	75,57	75,57

Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,18	73,30	73,42	73,50	73,50
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	100	100	100	100	100
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata	Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya	%	6	6	6	6	6
7	Program Pemasaran Pariwisata	Tercapainya Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	%	35	37	38	39	39
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	17	28,08	34,61	41,14	41,14
9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	%	13,06	22	32	42	42

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sejak dikeluarkannya dokumen ini sampai dengan tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.